



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi dalam menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peneglosalan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 558);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 1017);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi.
 2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional.
 3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi.
 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota.
 5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat :
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
 7. Menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi

Kepulauan Riau dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Januari 2025



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 105 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Ketua I
2.	Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Ketua II
3.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksana Harian Tugas
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris I
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris II
7.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Kepala Perwakilan Bulog Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
18.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
26.	Kepala Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam dan BUMD Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
28.	Hj.Nurhazan, S.E Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
29.	Nuraini, S.E Analis Proyek Pemerintah pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

